



PERJANJIAN KINERJA 2025

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. DOHRI AS'ARI

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama,

KEPALA BAPELITBANGDA

Drs. DOHRI AS'ARI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	%	100
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan	%	100
		Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan	%	45,45
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,15

Program

Anggaran

1. Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 2.152.665.650
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.047.136.900
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.646.129.824
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 946.980.000
Total	Rp 10.792.912.374

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama :

KEPALA BAPELITBANGDA



Drs. DOHRI AS'ARI

LAMPIRAN PENJELASAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Penjelasan Sasaran Kinerja 1

• **Meningkatnya Konsistensi Antara Perencanaan Dan Penganggaran**

Yang dimaksud dengan sasaran ini adalah suatu keadaan yang menggambarkan suasana yang tertib dan teratur. Konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam program dan kegiatan merupakan proses keterpaduan dan penguatan penyusunan rencana dan anggaran dalam pencapaian tujuan pembangunan. Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

• **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Semakin tinggi nilai keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam rangka pencapaian visi misi yang telah direncanakan	$\frac{K1+K2+K3+K4}{4}$ Dimana : K1 = % keselarsan Program RKPD terhadap RPJMD K2 = % keselarsan program KUA PPAS terhadap RKPD K3 = % keselarsan program Renstra OPD terhadap RPJMD K4 = % keselarsan program Renja OPD terhadap RKPD	Bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan semua OPD

• **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1.	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	100%	Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Hal inilah yang digunakan untuk menetapkan target kinerja. Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja ini telah mencapai angka maksimal yaitu 100%.

Penjelasan Sasaran Kinerja 2

- **Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan**

Yang dimaksud dengan sasaran ini adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan bertujuan menghasilkan pemahaman baru mengembangkan produk yang diawali dengan riset kebutuhan kemudian dilakukan pengembangan untuk menghasilkan sebuah produk yang telah teruji yang dapat diterapkan di daerah.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah,
3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah.

- **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan	Kegiatan kelitbangan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah dan bukti untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Semakin banyak rekomendasi kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan maka peluang untuk melakukan inovasi semakin besar	Jumlah kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen APBD / Jumlah kelitbangan dalam dokumen RPJMD	Bidang Penelitian dan Pengembangan
2.	Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan	Peran kelitbangan menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan inovasi, sehingga riset yang dilakukan yang tentunya harus searah dengan RPJMD. Pemanfaatan hasil penelitian pengembangan, yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, Inovasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.	Jumlah inovasi yang dihasilkan oleh PD dari rekomendasi kajian kelitbangan / Jumlah rekomendasi dari kajian kelitbangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1.	Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan	100	Target kinerja persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan dapat terjaga nilainya, sehingga dapat menghasilkan teknologi baru terkait penyelenggaraan pemerintahan
2.	Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan	45,45	Target Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya. Dengan target 45,45%, diharapkan perkembangan inovasi di Luwu Timur dapat meningkat setiap tahunnya

Penjelasan Sasaran Kinerja 3

- **Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**

Yang dimaksud dengan sasaran kinerja ini adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam mencapai misi tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang baik. Dasar hukum dalam pencapaian sasaran kinerja ini antara lain :

1. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah tercermin dari nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Laporan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,15	Target yang ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, untuk hasil evaluasi pelaksanaan AKIP tahun 2023 oleh inspektorat adalah 78,45, sehingga untuk tahun 2025 ditetapkan target 80,15. Dengan harapan pelaksanaan AKIP di Bapelitbangda Tahun 2025 dapat meningkat.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SYAIFULLAH, ST.,MT
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. DOHRI AS'ARI
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAPELITBANGDA

Drs. DOHRI AS'ARI
Nip. 19670912 198811 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

Dr. SYAIFULLAH, ST.,MT
Nip. 19710119 200112 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun / jumlah dokumen perencanaan yang seharusnya disusun x 100
2	Tertib administrasi keuangan	Tepat waktu laporan keuangan	100%	Jumlah laporan keuangan yang disusun / jumlah laporan keuangan yang seharusnya disusun x 100%
3	Kualitas pengelolaan asset	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	Jumlah BMD yang administrasikan / Jumlah total BMD pada Perangkat Daerah x 100
4	Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 %	100%	Jumlah ASN dengan nilai SKP diatas 90% / jumlah ASN Bapelitbangda x 100
5	Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	95%	Rata-rata capaian kinerja pelayanan OPD
6	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%	Jumlah laporan monev yang disusun / jumlah laporan monev yang seharusnya disusun x 100

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.015.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.715.966.824,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.315.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	234.175.000,00
5	Aministrasi Umum Perangkat Daerah	402.748.000,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	894.400.000,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.760.000,00

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.750.000,00
JUMLAH		6.646.129.824,00

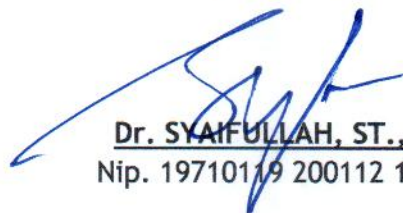
Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAPELITBANGDA



Drs. DOHRI AS'ARI
Nip. 19670912 198811 1 003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS



Dr. SYAIFULLAH, ST., MT
Nip. 19710119 200112 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUNADIAH AS'AD, ST.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. DOHRI AS'ARI
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAPELITBANGDA

Drs. DOHRI AS'ARI
Nip. 19670912 198811 1 003

Pihak Pertama,
KABID. PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

MUNADIAH AS'AD, ST.,M.Si
Nip. 19760411 200604 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Sasaran	Indikator	Target	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase program RPJMD yang diakomodir ke dalam Renstra OPD	100%	Jumlah program Renstra tahun berkenan / Jumlah program RPJMD tahun berkenan x 100
		Persentase program RKPD yang diakomodir ke dalam Renja OPD	100%	Jumlah program Renja tahun berkenan / Jumlah program RKPD tahun berkenan x 100
2.	Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Persentase usulan Prioritas masyarakat yang diakomodir dalam dokumen RKPD	95%	Jumlah usulan prioritas desa yang dimuat pada dokumen RKPD/ Total prioritas usulan - desa x 100
3.	Optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase rekomendasi monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	Jumlah rekomendasi monev RKPD yang ditindaklanjuti / total rekomendasi monev x 100
4.	Meningkatnya pemahaman SDM perencana terhadap standar dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	100%	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar / jumlah dokumen perencanaan yang disusun x 100

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.586.004.100,00
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.028.850,00
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	466.632.700,00
JUMLAH		2.152.665.650,00

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAPELITBANGDA



Drs. DOHRI AS'ARI
Nip. 19670912 198811 1 003

Pihak Pertama,
KABID. PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH



MUNADIAH AS'AD, ST., M.Si
Nip. 19760411 200604 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. MUJAHID SHALEH, ST.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. DOHRI AS'ARI
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAPELITBANGDA

Drs. DOHRI AS'ARI
Nip. 19670912 198811 1 003

Pihak Pertama,
KABID. PEREKONOMIAN, SDA, PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR

M. MUJAHID SHALEH, ST.,M.Si
Nip. 19830305 200902 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pemahaman SDM perencana Lini Koordinasi bidang Perekonomian, SDM dan Infrastruktur Kewilayahan	Persentase SDM perencanaan lini koordinasi bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan yang telah menyampaikan dokumen sesuai standar	100%	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun sesuai standar / jumlah dokumen yang disusun x 100

No	Nama kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	282.088.400,00
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	276.685.500,00
	JUMLAH	558.773.900,00

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAPELITBANGDA



Drs. DOHRI AS'ARI
Nip. 19670912 198811 1 003

Pihak Pertama,
KABID. PEREKONOMIAN, SDA, PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR



M. MUJAHID SHALEH, ST., M.Si
Nip. 19830305 200902 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELTA DATU TASIK, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. DOHRI AS'ARI
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAPELITBANGDA

Drs. DOHRI AS'ARI

Nip. 19670912 198811 1 003

Pihak Pertama,
KABID. PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

DELTA DATU TASIK, SE., M.Tr.A.P

Nip. 19840108 200803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pemahaman SDM perencana Lini Koordinasi bidang PPM	Persentase SDM perencanaan lini koordinasi bidang PPM yang telah menyampaikan dokumen sesuai standar	100%	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun sesuai standar / jumlah dokumen yang disusun x 100

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	488.363.000,00
	JUMLAH	488.363.000,00

Malili, 02 Januari 2025

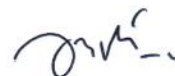
Pihak Kedua,
 KEPALA BAPELITBANGDA



Drs. DOHRI AS'ARI

Nip. 19670912 198811 1 003

Pihak Pertama
 KABID. PEMERINTAHAN DAN
 PEMBANGUNAN MANUSIA



DELTA DATU TASIK, SE., M.Tr.A.P

Nip. 19840108 200803 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AINUDDIN, S ST., M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. DOHRI AS'ARI
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

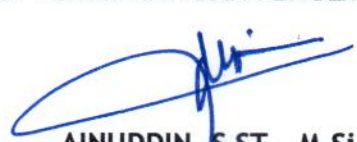
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BAPELITBANGDA


Drs. DOHRI AS'ARI
Nip. 19670912 198811 1 003

Pihak Pertama,
KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


AINUDDIN, S ST., M.Si
Nip. 19691225 199403 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sinkronnya kelitbangan yang dihasilkan terhadap permasalahan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang relevan dengan permasalahan daerah	50%	Jumlah kelitbangan yang dihasilkan relevan dengan permasalahan daerah / kelitbangan yang dihasilkan x 100
2.	Meningkatnya inovasi yang dihasilkan oleh OPD maupun masyarakat	Persentase inovasi yang dihasilkan	100%	Jumlah inovasi yang dihasilkan / jumlah isu/permasalahan yang dipetakan x 100

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	320.0000.000,00
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	120.600.000,00
3.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	120.600.000,00
4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	385.780.000,00
	JUMLAH	946.980.000,00

Matili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
 KEPALA BAPELITBANGDA



Drs. DOHRI AS'ARI

Nip. 19670912 198811 1 003

Pihak Pertama,
 KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



AINUDDIN, S ST., M.Si

Nip. 19691225 199403 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PATMAWATI, S.AN

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. SYAIFULLAH, ST.,MT

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

Dr. SYAIFULLAH, ST.,MT
Nip. 19710119 200112 1 006

Pihak Pertama,

KASUBAG. KEUANGAN

PATMAWATI, S.AN
Nip. 19840101 200901 2 002

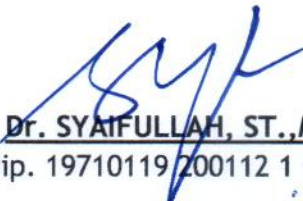
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30
2.	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	14

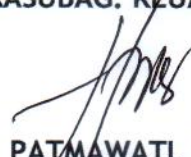
No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.623.596.824,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	92.370.000,00
JUMLAH		4.715.966.824,00

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Dr. SYAIFULLAH, ST., MT
Nip. 19710119/200112 1 006

Pihak Pertama,
KASUBAG. KEUANGAN


PATMAWATI, S. AN
Nip. 19840101 200901 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARDIATI, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. SYAIFULLAH, ST.,MT

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

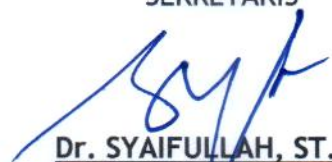
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

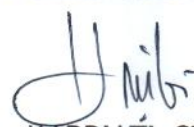
Pihak Kedua,

SEKRETARIS


Dr. SYAIFULLAH, ST.,MT
Nip. 19710119 200112 1 006

Pihak Pertama,

KASUBAG. PROGRAM


MARDIATI, SE
Nip. 19810826 201503 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	3
2.	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2
3.	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2
4.	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	5

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.295.000,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.500.000,00
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.600.000,00
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.620.000,00
JUMLAH		105.015.000,00

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Dr. SYAIFULLAH, ST.,MT
 Nip. 19710119 200112 1 006

Pihak Pertama,
KASUBAG. PROGRAM


MARDIATI, SE
 Nip. 19810826 201503 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIO FINITO LAMORATI, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. SYAIFULLAH, ST.,MT

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

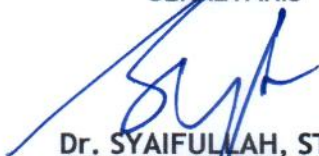
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Dr. SYAIFULLAH, ST.,MT
Nip. 19710119 200112 1 006

Pihak Pertama,
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN


ARIO FINITO LAMORATI, SE
Nip. 19840418 201101 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	2
2.	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	48
3.	Tersedianya data administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12
4.	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan kepada ASN	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	18
5.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor yang disediakan	1
6.	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4
7.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2
8.	Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6
9.	Tersedianya laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2
10.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2
11.	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1
12.	Tersedianya mebel sebagai penunjang pelayanan administrasi	Jumlah mebel yang disediakan	4
13.	Tersediannya peralatan/mesin lainnya sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13
14.	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1
15.	Terlaksananya administrasi surat masuk dan keluar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2
16.	Terbayarnya rekening telepon, listrik dan TV kabel	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2
17.	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2
18.	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	9
19.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40

20.	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1
-----	---	---	---

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.315.000,00
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.650.000,00
3.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00
4.	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	139.525.000,00
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	5.000.000,00
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.750.000,00
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.850.000,00
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.300.000,00
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.050.000,00
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.798.000,00
11.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000,00
12.	Pengadaan Mebel	51.000.000,00
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.400.000,00
14.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00
15.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000,00
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.960.000,00
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.800.000,00
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000,00
19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.250.000,00
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00
JUMLAH		1.825.148.000,00

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS



Dr. SYAIFULLAH, ST., MT

Nip. 19710119 200112 1 006

Pihak Pertama,

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ARIO FINITO LAMORATI, SE

Nip. 19840418 201101 1 006